



# APBD-P Belum Dipastikan Dibahas

## ▶ Paripurna Pengesahan Lewati Batas Waktu

**NANGA PINOH, SP** - Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Melawi belum diketahui apakah akan berlanjut atau tidak.

Waktu yang sempit hingga belum optimalnya persidangan di DPRD Melawi, bisa mengganjal pembahasan APBD Perubahan tersebut.

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono, ditemui usai membuka kegiatan Uji Sertifikasi, Kamis lalu menerangkan, draf KUA-PPAS APBD Perubahan Melawi 2019 sudah diserahkan ke DPRD Melawi, namun hingga kini memang belum ada pembahasan.

Sedangkan draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi



**Ivo Titus Mulyono**  
Sekda Melawi

**Hanya kan, prosesnya masih lama. KUA PPAS selesai pun kita harus susun RKA APBD Perubahan. Kita khawatir tak terkejar waktu untuk perubahan. Kalau untuk murni sih, sekarang dalam review Inspektorat.**

2020 juga belum dilanjutkan pembahasannya.

Mengenai draf KUA-PPAS APBD Murni Melawi 2020, kata Ivo, sudah dilakukan pembahasan bersama, namun belum ada kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Melawi.

"Hanya RKA sudah, asistensi sudah. Tapi sekarang kan, harus ada *review* dari inspektorat sesuai dengan aturan yang baru. Kita ketahui, tenaga di Inspektorat terbatas, sehingga proses *review* ini tidak bisa secepatnya selesai. Namun begitu, kita sudah perintahkan, agar Inspektorat bisa bekerja maksimal menyelesaikan proses *review* ini. Ini untuk APBD

2020," papar Ivo.

Menurut Ivo, untuk APBD Perubahan 2019, memang belum dibahas di DPRD. Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan bisa saja dilakukan oleh pimpinan DPRD sementara.

"Hanya kan, prosesnya masih lama. KUA PPAS selesai pun kita harus susun RKA APBD Perubahan. Kita khawatir tak terkejar waktu untuk perubahan. Kalau untuk murni sih, sekarang dalam *review* Inspektorat," jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengungkapkan, dengan tidak ada pembahasan mengenai draf KUA-PPAS APBD Perubahan

Melawi 2019, maka paripurna pengesahan APBD Perubahan 2019 sudah melewati batas waktu pada 30 September lalu.

"Bila pada 30 September tidak juga bisa menggelar paripurna pengesahan APBD Perubahan, maka draf APBD Perubahan tidak bisa dibawa ke provinsi untuk asistensi evaluasi. Alias,

APBD Perubahan tidak bisa digunakan, atau daerah tanpa APBD Perubahan," terang Iif, Jumat (4/10).

Sebenarnya, kata Iif, selain membahas draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2019, sejumlah agenda penting warisan anggota DPRD yang lama belum terselesaikan dan menjadi agenda anggota DPRD yang baru

untuk menyelesaikannya.

"Agenda yang harus terselesaikan, di antaranya laporan pembahasan empat Raperda, pendapat akhir fraksi terhadap empat Raperda, rekomendasi LHP BPK atas laporan keuangan Melawi tahun 2018, LPJ APBD 2018, dan penandatanganan KUA-PPAS APBD 2020," jelas Iif. **(eko/lha)**